

BAB III

PARADIGMA KEPEMIMPINAN ABRI DI INDONESIA

A. Bukti sejarah kepemimpinan ABRI

Sejak terbentuknya ABRI pada tahun 1945 faktor kepemimpinan selalu memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Baik untuk kelompok-kelompok ABRI yang tersebar menjalankan perjuangannya masing-masing dalam rangka perjuangan nasional yang besar, maupun untuk ABRI secara keseluruhan. - Apalagi karena ABRI dan khususnya TNI telah terbentuk dan tumbuh sebagai gerakan yang dapat disamakan dengan satu *levée en masse* atau kebangkitan rakyat secara spontan.

Sukar dibayangkan lahirnya dan kelangsungan hidup dari pasukan-pasukan yang ada di mana-mana, andai kata tidak ada kepemimpinan. Sebab orang tidak dibayar dan tidak dibekali dari satu organisasi pusat, padahal perjuangan harus berjalan terus menghadapi pasukan penjajah. Ketika lambat laun pusat makin mampu untuk melebarkan kekuasaan dan dukungannya ke daerah, masih tetap diperlukan kepemimpinan di daerah untuk dapat melaksanakan kehendak pusat sesuai dengan kondisi daerah yang berbeda-beda. Di pusat pun ABRI harus dapat mengembangkan kepemimpinan untuk dapat mempersatukan segenap perjuangan yang dilakukan di daerah-daerah guna mencapai tujuan bersama. (Sayidiman Suryohadiprojo Letjen. Purn 1992 : 217).

Untuk mencapai tujuan, Semangat perjuangan manunggalnya ABRI dan rakyat itu tidak pernah pudar, bahkan berkembang terus selama tahap-tahap pengisian kemerdekaan dengan melembaganya peranan ABRI sebagai kekuatan Hankam dan unsur kekuatan sosial. Dan ABRI sebagai kekuatan sosial melaksanakan tugasnya dengan serasi dan mengusahakan adanya integrasi dengan Rakyat seluas-luasnya atas dasar "partnership" yang sejajar dengan kekuatan sosial lainnya untuk membela keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya keamanan nasional dan di lain pihak upaya keamanan nasional juga hanya bisa berhasil dengan baik bila didukung oleh upaya dalam bidang kesejahteraan nasional. yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup, upaya menciptakan suasana lingkungan yang aman dan damai tidaklah boleh diabaikan.

Hasil upaya dalam bidang kesejahteraan nasional yang menciptakan suasana kehidupan yang kerta-raharja, di sertai hasil upaya yang serasi dalam bidang keamanan nasional yang menciptakan suasana lingkungan yang tata tenteram, memberikan kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk dapat memelihara kelangsungan hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan dan ancaman ini. Kemampuan ini merupakan hakekat dari pada ketahanan nasional. Berpangkal tolak dari makna -

ketahanan nasional Inilah, bangsa Indonesia membangun kemampuan nasionalnya semata-mata untuk penyelamatan diri dan bukan untuk digunakan sebagai sarana dalam politik adu kekuatan antar negara. (Drs. A. Chalik Ali, tt. : 64).

Dalam rangka mencapai tujuan perjuangan bangsa Indonesia di perlukan adanya integrasi ABRI dengan Rakyat yang sebaik-baiknya, sebagaimana telah di buktikan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia.

Untuk memelihara dan meningkatkan integrasi ABRI dengan Rakyat di perlukan adanya usaha-usaha yang kongkrit di setiap anggota ABRI, di sertai dengan semangat dan pengertian yang mendalam oleh semua pihak. (Pola dasar Pembinaan Mental ABRI "PINAKA BALADIKA", 5 mei 1972 : 15).

Pada tahap awal orde baru belum adanya kesatuan konsepsi dan kesamaan sikap dan gerak dalam lingkungan ABRI. Ini adalah akibat adanya revalitas antara angkatan dan polisi yang berkedudukan menteri dan langsung di bawah Presiden/Panglima tertinggi/Pimpinan besar Revolusi. Dalam rangka integrasi ABRI dan untuk dapat memperkokoh kesatuan di lingkungan ABRI, terutama secara mental psikologis, di adakanlah seminar Hankam(1966) yang diikuti oleh semua Angkatan dan Polri. Seminar ini menghasilkan Doktrin pertahanan Keamanan Nasional (Doktrin ABRI sebagai kekuatan Hankam) dan Doktrin perjuangan ABRI (Doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial politik) yang dirangkumkan dalam satu dokumen dan-

Kemudian, mengenai pengaturan Dwi Fungsi ABRI dalam undang-undang baru dimulai pada zaman Orde Baru, walaupun sebelumnya beberapa peraturan perundangan telah menyinggung kedudukan ABRI sebagai golongan Fungsional seperti umpamanya UU no. 7 tahun 1957 tentang Dewan nasional, UU no. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, dan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Dengan kedua undang-undang itu, maka untuk pertama kalinya ABRI secara formal diakui sebagai golongan fungsional dan wakil-wakilnya duduk sebagai anggota dalam Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional. Tidak lama kemudian setelah pembentukan DPR-GR dan MPRS pada tahun 1960 maka ABRI mempunyai perwakilan di dalamnya. Dasar hukumnya adalah penetapan Presiden dan keputusan Presiden. Peraturan Perundangan zaman Orde Baru yang menyangkut Dwi Fungsi ABRI dimulai dengan ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 yang kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang antara lain mengatakan :

"Mengingat Dwi Fungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa".

Kemudian ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwi fungsi ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan Nasional dengan kalimat :

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dwifungsi ABRI mempunyai dasar hukum yang kuat sekali, baik di lihat dari segi teori hukum maupun dari segi hukum yang berlaku. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa hukum tidak berdiri sendiri karena pada hakekatnya hukum adalah cermin - dari kehidupan masyarakat dan cita-citanya. Ada yang mengemukakan bahwa hukum adalah wajah daripada politik. hal ini berarti kalau politik berubah, atau kehidupan atau cita - cita berubah maka hukum dapat berubah pula. Artinya, apa yang dianggap legal dan legitim sekarang ada kemungkinan bahwa nantinya hal itu tidak dianggap legitim lagi, dan kalau sesuatu hal yang dianggap sebagai tidak legitim lagi, artinya tidak diterima lagi oleh masyarakat, maka Undang - Undangnyapun harus berubah. Kalaupun undang-undangnya secara formal tidak berubah maka daya berlakunya sudah goyah. Berkenaan dengan masalah ini perlu diingat pendapat seorang pakar sosiologi kemiliteran Profesor Jacques van Doorn yang mendalilkan bahwa secara umum legitimasi angkatan bersenjata akan tetap terjamin (1) selama fungsinya sejalan dengan tujuan yang oleh bangsa yang bersangkutan dianggap legitim, (2) selama subkultur angkatan bersenjata sejalan dengan budaya politik bangsanya, dan (3) selama susunan angkatan bersenjata cukup mencerminkan susunan atau komposisi masyarakat politiknya. (Soebijono (Ed), et. al, 1992 : 122 - 123)

Berdasarkan rumusan ini, maka agar dasar hukum Dwi-

Untuk menimbulkan persepsi demikian pada pihak lain, maka setiap organisasi yang menjadi bagian dari ABRI perlu menunjukkan efektivitas dan mutu yang sebaik mungkin. Disiplinnya tinggi, cara bekerjanya lancar dan efektif, orang-orangnya terasa bermotivasi tinggi, hubungannya dalam masyarakat baik, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan efektivitas dan mutu. Itu berarti bahwa setiap bagian ABRI harus mempunyai pemimpin yang menjalankan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Akan tetapi mungkin pihak lain akan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketertiban dan perdamaian masyarakat yang ada. Dalam hal itu ABRI harus dapat mengakhiri pelanggaran itu dengan secepat dan setuntas mungkin. Itu berarti bahwa kemampuan operasional ABRI harus tinggi. Untuk itu setiap bagian ABRI sudah dibiasakan untuk menjalankan operasi apabila diperlukan, melalui penyelenggaraan latihan-latihan sebelum ada peristiwa pelanggaran. Pemikiran dan pelaksanaan taktik pasukan perlu senantiasa diuji, sehingga dalam operasi dapat melakukan tindakan yang tepat dan berhasil guna.

Berarti bahwa kepemimpinan yang harus dipelihara - tidak hanya yang baik untuk menghadapi situasi yang relatif stabil, melainkan juga kepemimpinan yang cakap bergerak dalam kondisi yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Kemampuan untuk memimpin dalam situasi dengan risiko tinggi harus ada pada seorang pemimpin ABRI (Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 223)

Kepemimpinan ABRI sebagai kekuatan Hankam yang di dasarkan atas sistim Hamkamrata, untuk mewujudkan citra ke manunggalan ABRI dengan rakyat. Perwujudan kemanunggalan - ABRI dengan Rakyat harus dapat menggambarkan bahwa dalam tugas-tugas membela negara dan bangsa, yang benar-benar - menjadi partner ABRI adalah rakyat.

Prinsip-prinsip kemanunggalan ABRI dengan rakyatitu tidak hanya penting bagi ABRI dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai kekuatan sosial, tetapi disampingitu juga sebagai kekuatan Hamkam.(Drs.A.Chalik Ali, tt : 200)

Kepemimpinan di lingkungan ABRI sebagai kekuatan Hamkam juga memerlukan kecakapan untuk mengembangkan pand-angan strategi. Sejumlah perwira yang pada saatnya memper-oleh kesempatan menduduki jabatan tinggi dalam dalam hira-rki Hankam harus mempunyai kemampuan itu, kalau ABRI harus memenuhi dharmanya sebagai kekuatan Hankam yang andal se-panjang masa. Pandangan strategi itu berpengaruh besar kepada perumusan kebijakan dalam segala bidang yang diha - dapi dan yang harus dilaksanakan ABRI.

Ada orang yang mengatakan bahwa perwira itu cukup baik kalau sudah cakap bertempur, dan itupun paling tinggi pada tingkat kesatuan kompi senapan yang memang di medan tempur secara langsung berhadapan dengan musuh.dan Anehnya bahwa orang yang berpendapat demikian diketemukan dalam - hampir semua angkatan bersenjata di dunia, juga di ling-

kungan ABRI. Sudah jelas sekali bahwa pandangan demikian amat menyesatkan. Adalah benar bahwa perwira harus cakap dalam pertempuran, artinya mempunyai kecakapan taktik. Akan tetapi perjuangan itu tidak hanya mempunyai aspek taktik saja, demikian pula perjuangan militer. Selain mempunyai aspek taktik, perjuangan mempunyai aspek strategi dan logistik. Kalau para perwira yang duduk dalam pucuk pimpinan ABRI kurang mampu mengembangkan pandangan strategi yang sehat, maka doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan taktik dan logistik akan serba salah arah, dengan segala akibatnya yang negatif. (Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 225)

Perwira yang duduk dalam pimpinan ABRI harus dapat mengembangkan pandangannya mengenai masalah-masalah ini secara jelas, dan memberikan pendapatnya kepada pimpinan politik negara. Keselamatan dan kesejahteraan nasional amat tergantung pada kemampuan strategi itu.

Dengan demikian seorang perwira harus dapat mengembangkan kemampuan maksimal sesuai dengan tempatnya berada. Kalau menjadi komandan pasukan tempur maka ia harus menjadi seorang taktikus yang ulung, yang cerdas, cerdik, lincah dan sukar di tebak lawan. Kalau ia berada di lingkungan logistik maka ia harus sanggup bekerja metodis dan sistematis serta teratur, pada saatnya juga inovatif. Kalau ia menjadi perwira staf maka ia dapat berpikir dan mengembangkan konsep dan saran yang mendukung tugas komandan. Kalau ia menjadi perwira teritorial maka ia harus mampu bergaul-

- 3) Kemampuan teknis, administratif, dan manejerial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan orang-orang sipil (berkat sistem persenjataan modern yang menuntut adanya manajemen modern);
- 4) Fungsi kebayangkarian dalam wujud pengabdian yang heroik dan kekesatriaan, untuk menegakkan keamanan dan ketentraman umum;
- 5) Adanya esprit de corps dengan kohesi internal yang sangat kuat. (Dr. Kartini Kartono, 1994 : 254-255)

Oleh karena itu peranan militer dan kepemimpinannya itu pada hakekatnya bukan merupakan penonjolan karakteristik sosial-militer, akan tetapi merupakan respons(reaksi)-dari struktur politik dan struktur institusional masyarakat yang belum mapan benar, yang masih lemah, berantakan, kiseruh, dan kacau.

Selanjutnya, Kepemimpinan ABRI itu sangat efisien dan dinamis; sedang dalam keadaan kritis serta masa perang, kaum militer cenderung menjadi semakin otoriter dan semakin keras.

Sifat-sifat kepemimpinan militer/ABRI yang sangat menonjol antara lain ialah :

- 1) Otoriter lewat komando dan asas efisiensi;
- 2) Ada disiplin tinggi dan esprit de corps yang kuat, serta pengabdian penuh pada tugas-tugas;
- 3) Interaksi yang searah, disertai kepatuhan total terhadap

komando dengan penentuan tugas-tugas yang jelas; dan rasa tanggung jawab yang besar;

- 4) Memiliki stamina (daya tahan) fisik dan mental yang tinggi/kuat berkat latihan-latihan rutin setiap hari; - dengan daya reaksi yang cepat,hati-hati,cermat-teliti;
- 5) Memiliki loyalitas dan integritas tinggi, yang di lam - bari sifat kejujuran;
- 6) Bersikap selalu terbuka terhadap perubahan,progres/ke - majuan,ide-ide baru,inovasi dan modernisasi;
- 7) Efisien secara teknis dan taktis;di samping kompeten da - lam pendidikan dan pertempuran atau perang;
- 8) Kompetensi tersebut mengarah pada profesionalisasi,den - gan kemampuan manajerial serta kemampuan tempur yang semakin tinggi.(Dr. Kartini Kartono, 1994 : 256)

ABRI dalam mengemukakan pandangannya dalam mengenai sesuatu yang penting dan bersangkutan dengan negara dan bangsa. Kalau kemudian pimpinan nasional mengambil keputusan,maka ABRI taat pada keputusan itu sekalipun mungkin - berbeda atau bertentangan dengan pendapat ABRI yang telah dikemukakan.Akan tetapi karena ABRI memberikan pendapatnya setelah mengadakan pertimbangan yang luas dan mendalam,ma - ka biasanya bobot pendapatnya cukup tinggi dan karena itu menjadi perhatian dan pertimbangan penting bagi pimpinan nasional. Contohnya adalah pendapat yang disampaikan oleh pimpinan TNI kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan - dokrit untuk kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959, ketika -

Majelis Konstituante menghadapi kemacetan yang merugikan negara dan bangsa. (Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 229)

Untuk dapat menyampaikan pendapat yang berbobot - mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan negara dan bangsa para perwira. terutama yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan di Pusat dan Daerah, tentu harus mempunyai pandangan kemasyarakatan yang cukup luas. Dan mampu untuk mengukur pandangan yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian keberhasilan kepemimpinan ABRI untuk memenuhi harapan amat di tentukan oleh sikap kepimpinannya itu sendiri. Sudah tentu sikap kepemimpinan itu bersifat kerakyatan artinya ABRI mengutamakan kedaulatan rakyat dalam sistem kenegaraan kita, dan sebaliknya menolak Diktator, termasuk diktator militer. Akan tetapi juga penting sekali bahwa sikap kepemimpinan itu terbuka untuk mencapai tujuan yang sama.